

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Klaten

Halaman 15

Tunjangan Anggota DPRD Klaten Naik

Kecuali Pimpinan, Fasilitas Kendaraan Dicabut

KLATEN – Dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD 2017, Pemkab Klaten menggelontorkan tambahan anggaran sebesar Rp3,8 miliar sebagai tambahan tunjangan bagi anggota DPRD. Tambahan tunjangan tersebut meliputi tunjangan transportasi dan tunjangan reses.

"Rp3,8 miliar merupakan persiapan tambahan tunjangan bagi anggota DPRD selama lima bulan kedepan. Sebab sudah ada PP dan Perda, tinggal menunggu Perbup-nya saja," kata Plt Sekwan Klaten, Edy Hartanto.

Nantinya, imbuh Edy, Perbup tersebut akan mengatur secara rinci besaran tunjangan bagi anggota DPRD sesuai dengan standar dari pusat dan kemampuan keuangan daerah. Salah satunya adalah tunjangan transportasi

Rp3,8 miliar merupakan persiapan tambahan tunjangan bagi anggota DPRD selama lima bulan kedepan. Sebab sudah ada PP dan Perda, tinggal menunggu Perbup-nya saja

EDY HARTANTO
Plt Sekwan Klaten

bagi anggota DPRD yang diperkirakan berkisar diantara Rp5 juta sampai Rp7 juta per bulannya.

"Dengan adanya tunjangan transportasi yang diberikan ini,

maka nantinya hanya empat pimpinan yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas yakni Ketua DPRD dan tiga Wakil Ketua DPRD. Sedangkan anggota DPRD tidak akan lagi menerima fasilitas kendaraan dinas dari Pemkab Klaten," tambah Edy.

Sementara itu, Ketua DPRD Klaten, Agus Riyanto mengatakan, dengan diterbitkannya PP Nomor 18 Tahun 2017 maka harus ditindaklanjuti dengan Perda. Dalam hal ini PP harus ditindaklanjuti maksimal tiga bulan sejak diterbitkan.

"Memang ada perubahan-perubahan yang intinya ada tambahan untuk take home pay anggota DPRD. Salah satunya adalah tunjangan transportasi dan tunjangan reses," urai Agus. (aya/saf)